

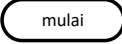


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nomor SOP	MORA.14.03.09
Tanggal pembuatan	01 Desember 2025
Tanggal revisi	03 Januari 2026
Tanggal efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Bagian Tata Usaha H. Edison, M.Ag. NIP. 197603051997031003
Judul SOP	Pengujian tentang Konsekuensi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 8. KMA Nomor 461 Tahun 2020 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 2. Memiliki jenis informasi dikecualikan 3. Memahami Prosedur uji konsekuensi 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip 6. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3. SOP Penetapan dan pemutakhiran DIP	1. Daftar Informasi Publik 2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya tidak berjalan dengan baik	Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

SOP Pengujian tentang Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Staf Pelaksana PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID unit terkait disertai alasannya					informasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	usulan informasi yang dikecualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit mengusulkan informasi yang dikecualikan
2	Menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID					Draft DIK dan alasan	60 menit	Draft DIK dan alasan	PPID menelaah usulan DIK dari PPID Unit
3	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dai PPID unit					Draft DIK dan alasan	30 menit		Nama informasi yang dikecualikan tersebut terlebih dahulu dibahas dimasing-masing unit
4	PPID menerima daftar infromasi yang dikecualikan dari PPID unit					Draft DIK dan alasan	45 menit	Draft DIK dan alasan	untuk dibahas bersama PPID unit
5	Melaksanakan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama PPID unit terkait					Draft DIK dan alasan	180 menit	Menguji usulan DIK dari PPID unit	uji konsekuensi dengan melibatkan PPID unit dan pejabat unit kerja terkait
6	Memutuskan hasil uji konsekuensi					Draft DIK dan alasan	60 menit		pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
7	Selesai								